

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah proses umum yang dilalui untuk mendapatkan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Mencari beberapa kumpulan penelitian yang terkait kemudian diangkat untuk mendukung penelitian yang dibuat agar penelitian semakin menguat.

2.1.1 Kemiskinan

Konsep mengenai kemiskinan dibentuk berdasarkan identifikasi dan pengukuran terhadap sekelompok masyarakat/golongan yang selanjutnya disebut miskin (Marcelinus Molo, 1995). Pada umumnya, setiap negara termasuk Indonesia memiliki definisi mengenai seseorang atau suatu masyarakat yang dikategorikan miskin. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, serta standar kesejahteraan. Penentuan status miskin umumnya didasarkan pada indikator seperti pendapatan rata-rata, daya beli, tingkat pendidikan, dan kondisi kesehatan.

Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup (Herispon et al., 2021). Berdasarkan pengertian ini, maka kemiskinan secara umum didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya yang menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup. Ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk

memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang maupun papan (Setiadi & Usman, 2011).

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (*basic needs*) dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sedangkan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Berikut cara pengukuran tingkat kemiskinan:

$$\text{Tingkat Kemiskinan (HCR)} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}{\text{Total Penduduk}} \times 100\%$$

Pengentasan kemiskinan masih menjadi perhatian pemerintah dalam memberikan program-program untuk mewujudkan target pembangunan nasional. Akan tetapi masalah kemiskinan masih menjadi masalah yang berkepanjangan. Penanggulangan kemiskinan merupakan inti dari semua masalah pembangunan dan bagi banyak orang pengentasan kemiskinan merupakan tujuan utama dari kebijakan pembangunan (Fir, 2018).

Salah satu definisi yang banyak diadopsi dalam program penanggulangan kemiskinan di negara berkembang adalah konsep dari Chambers, yang memandang kemiskinan sebagai suatu konsep terpadu (*integrated concept*) yang mencakup lima dimensi, yaitu:

1) Kemiskinan (*Proper*)

Kemiskinan *proper* merupakan kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan dasar.

2) Ketidakberdayaan (*Powerless*)

Ketidakberdayaan pada umumnya, merupakan rendahnya kemampuan

pendapatan yang berdampak pada kekuatan sosial (*social power*) dari seseorang atau sekelompok orang terutama dalam memperoleh kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3) Kerentanan menghadapi situasi darurat (*State of emergency*)

Ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dalam menghadapi kejadian tak terduga yang memerlukan alokasi pendapatan, seperti bencana alam atau biaya pengobatan tinggi.

4) Ketergantungan (*Dependency*)

Keterbatasan kemampuan pendapatan ataupun kekuatan sosial dari seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap pihak lain sangat tinggi untuk menciptakan solusi atau penyelesaian masalah terutama yang berkaitan dengan penciptaan pendapatan baru.

5) Keterasingan (*Isolation*)

Dimensi keterasingan seperti yang dimaksudkan oleh Chambers adalah faktor lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin seperti kehidupan masyarakat yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (Chambers, 1995).

2.1.1.1 Bentuk dan Jenis Kemiskinan

Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional, kemiskinan memiliki 4 bentuk. Adapun keempat bentuk kemiskinan tersebut adalah (Chriswardani Suryawati, 2005):

1) Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana pendapatan seseorang

berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup.

2) Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat atau daerah yang tertinggal.

3) Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi dan bukan hanya karena faktor ekonomi, tetapi karena pola budaya atau nilai. Kemiskinan ini terjadi karena rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, minimnya adopsi teknologi, atau pola kerja tradisional yang kurang produktif, sehingga sulit untuk meningkatkan pendapatan meskipun ada peluang ekonomi.

4) Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan.

Setelah dikenal bentuk kemiskinan, dikenal pula dengan jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya. Adapun jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya adalah:

1) Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terbentuk sebagai akibat adanya

kelangkaan sumber daya alam dan minimnya atau ketiadaan pra sarana umum.

2) Kemiskinan Buatan

Kemiskinan buatan adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki banyak kesempatan untuk menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi secara merata.

Kedua jenis kemiskinan di atas seringkali masih dikaitkan dengan konsep pembangunan yang sejak lama telah dijalankan di negara-negara sedang berkembang pada dekade 1970 dan 1980 (Ari Mulianta Ginting, 2004). Persoalan kemiskinan dan pembahasan mengenai penyebab kemiskinan hingga saat ini masih menjadi perdebatan baik di lingkungan akademik maupun pada tingkat penyusun kebijakan pembangunan (Chriswardani Suryawati, 2005).

Pada umumnya, identifikasi kemiskinan hanya dilakukan pada indikator-indikator yang relatif terukur seperti pendapatan per kapita dan pengeluaran/konsumsi rata-rata. Ciri-ciri kemiskinan yang hingga saat ini masih dipakai untuk menentukan kondisi miskin adalah:

- 1) Tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja, dan keterampilan yang memadai.
- 2) Tingkat pendidikan yang relatif rendah.
- 3) Bekerja dalam lingkup kecil dan modal kecil.
- 4) Berada di kawasan pedesaan atau di kawasan yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan regional.

- 5) Memiliki kesempatan yang relatif rendah dalam memperoleh bahan kebutuhan pokok termasuk dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan standar kesejahteraan pada umumnya.

2.1.1.2 Faktor Penyebab Kemiskinan

Ada tiga faktor penyebab terjadinya kemiskinan di pedesaan maupun di perkotaan, yaitu:

1. Sempitnya penguasaan dan kepemilikan lahan atau akses produksi lain, ditambah lagi kurangnya ketersediaan modal yang cukup untuk usaha.
2. Nilai tukar hasil produksi yang semakin jauh tertinggal dengan hasil produksi lain, termasuk kebutuhan hidup sehari-hari.
3. Tekanan perangkat kemiskinan dan ketidaktahuan masyarakat, yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki akses yang cukup untuk memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan.
4. Terjadi karena adanya keterbelakangan manusia dan sumber daya alam. Dalam pengelolaan sumber daya alam sangat bergantung pada kemampuan manusia. Jika penduduknya banyak yang miskin dan berpendidikan rendah maka akan mengakibatkan langkanya keterampilan teknik, pengetahuan, yang secara otomatis akan menyebabkan sumber daya alam yang tersedia justru terbengkalai, dan mampu meningkatkan terjadi kemiskinan.
5. Penyebab lain dari kemiskinan adalah kurangnya sumber daya manusia. Jika manusia tidak memiliki keterampilan maka ia tidak akan memiliki pendapatan yang menyebabkan daya belinya berkurang sehingga masuk ke dalam lingkaran

kemiskinan. Ini akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah bahkan negara.

2.1.1.3 Teori Kemiskinan

Ada beberapa teori mengenai kemiskinan ini sebagai berikut :

- 1) Teori Konservatif (Oscar Lewis) Menurut Lewis, teori ini menyatakan bahwa kemiskinan disebabkan oleh karakteristik orang miskin itu sendiri daripada struktur sosial. Orang-orang memandang orang miskin sebagai orang yang boros, ditakdirkan, kuno, dan bertanggung jawab atas kemiskinan mereka sendiri, seperti yang disebutkan Lewis (Palikhah, 2017).
- 2) Teori Liberal (*Valentine*) Liberal menganggap manusia sebagai makhluk baik yang sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Memperbaiki kondisi sosial ekonomi dengan menghilangkan diskriminasi dan menciptakan kesempatan yang sama dapat mengakibatkan penghapusan budaya kemiskinan yang cepat (Arifin, 2020).

2.1.2 Inflasi

Inflasi merupakan masalah yang terlalu sering di hadapi dalam perekonomian di berbagai negara. Inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Tingkat inflasi juga berbeda negara satu dengan negara lainnya bahkan dari tahun ke tahun lainnya. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Inflasi juga merupakan kecenderungan kenaikan harga secara umum dan

menyeluruh yang terjadi secara terus menerus hal tersebut dapat menyebabkan turunya daya beli konsumen (Artati et al., 2025).

2.1.2.1 Teori Inflasi

1. Teori Kuantitas

Teori kuantitas adalah bahwa inflasi itu hanya bias terjadi kalau ada penambahan volume uang beredar, baik uang kartal maupun uang giral. Apabila jumlah uang bertambah, inflasi akan berhenti dengan sendirinya. Laju inflasi disebabkan oleh pertambahan jumlah uang beredar dan anggapan masyarakat mengenai harga-harga.

Teori kuantitas ini dikemukakan oleh Irving Fisher. Setiap transaksi, jumlah yang dibayarkan oleh pembeli sama dengan jumlah uang yang diterima penjual. Hal ini berlaku untuk seluruh perekonomian dengan nilai barang yang dijual sama dengan volume transaksi dikalikan harga rata-rata barang tersebut.

2. Teori Keynes

Menurut Keynes inflasi terjadi akibat perebutan pendapatan antar kelompok sosial, seperti pemerintah, sektor swasta, dan serikat buruh, yang berusaha memperoleh bagian pendapatan melebihi kapasitas produksi nasional. Proses inflasi terus berlangsung selama jumlah permintaan efektif total tidak melebihi harga-harga yang berlaku dari jumlah output yang tersedia, maka inflasi akan berhenti (Muhammad Nurcholis, 2015).

3. Teori Struktural

Teori struktural menekankan bahwa inflasi tidak hanya disebabkan oleh ekspansi permintaan atau kebijakan moneter longgar, tetapi juga oleh faktor-faktor

struktural dalam perekonomian seperti cuaca ekstrem yang berdampak nantinya gagal panen bagi masyarakat.

2.1.2.2 Jenis Inflasi

Berdasarkan kepada sumber atau penyebab kenaikan harga-harga yang berlaku, inflasi biasanya dibedakan kepada tiga bentuk (Sukirno, 2012):

- a. *Demand pull inflation* (inflasi tarikan permintaan) Inflasi ini biasanya terjadi pada massa perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi.
- b. *Cost Inflation* (inflasi desakan biaya) Inflasi desakan biaya terjadi ketika biaya produksi meningkat, terutama dalam kondisi ekonomi yang tumbuh pesat dan tingkat pengangguran rendah.
- c. *Imported inflation* (inflasi diimpor) Inflasi dapat juga bersumber dari kenaikan harga-harga yang diimpor. Inflasi ini akan terjadi apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan-perusahaan.

Adapun berbagai cara untuk menggolongkan inflasi. Penggolongan pertama didasarkan atas parah tidaknya inflasi tersebut. Berdasarkan sifatnya, inflasi di kelompokkan dalam 4 jenis, yaitu:

a) Inflasi rendah/ merayap (*low inflation*)

Merupakan inflasi yang ditandai dengan kenaikan harga berjalan secara lambat dengan persentase yang kecil serta dalam jangka waktu yang relatif. Besar inflasi ini biasanya lebih kecil dari 10% per tahun.

b) Inflasi menengah (*galloping inflation*)

Inflasi ini sering disebut sebagai inflasi 2 digit. Ditandai dengan naiknya harga baik itu barang ataupun jasa dengan cepat serta relatif besar. Besar inflasi ini biasanya di antara 10%-30% per tahun.

c) Inflasi berat (*high inflation*)

Dalam inflasi tersebut, harga secara umum naik. Dimana sektor-sektor ekonomi sudah mulai mengalami kelumpuhan kecuali yang dikuasai oleh negara. Besar inflasi ini antara 30%-100%.

d) Inflasi sangat tinggi (*hyper inflation*)

Dalam inflasi ini mengakibatkan masyarakat tidak lagi berkeinginan menyimpan uang, nilai uang merosot lebih tajam, sehingga lebih baik membelanjakan uang dan menyimpan dalam bentuk barang seperti emas, tanah, bangunan, karena barang-barang ini kenaikannya setara dengan inflasi. Inflasi ini sering di sebut dengan inflasi 4 digit, dimana besar inflasi melebihi 100%.

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting dalam melakukan analisis pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai produksi *output* lebih banyak pada suatu negara disertai dengan perubahan dalam pengaturan teknis dan kelembagaan dimana output tersebut diproduksi dan didistribusikan.

Pertumbuhan ekonomi secara umum dapat dilihat melalui Produk Domestik Bruto (PDB) karena secara prinsip, pertumbuhan ekonomi merupakan penambahan output atas barang dan jasa yang diproduksi dalam satu periode atau kurun waktu

satu tahun. Keseluruhan output final dari barang dan jasa adalah merupakan total keseluruhan dari ekonomi negara, di dalam teritorial negara, oleh penduduk maupun bulan penduduk, dan tidak melihat alokasi antara dalam dan luar negeri (Todaro dan Smith, 2014).

Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan apabila seluruh balas jasa rill terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya. Hal ini, perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila pendapatan rill masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) rill. Menurut Dewi Ernita, (2013) pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan laju investasi di suatu negara karena akan menambah kegiatan ekonomi di negara tersebut sehingga dapat merangsang investor untuk menanamkan saham dan memperluas industrinya. Hal itu akan menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi jumlah pengangguran.

2.1.3.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu perekonomian dalam hal pembangunan. menurut beberapa pakar ekonomi pembangunan, bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan istilah bagi suatu negara yang sudah maju atau mencapai keberhasilan pembangunannya, sementara untuk negara yang sedang berkembang maka digunakanlah istilah pembangunan ekonomi (Indayani & Hartono, 2020).

Menurut Seto dalam penelitian Tini Febriani, (2024) menjelaskan secara umum teori pertumbuhan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan ekonomi modern. Pada teori pertumbuhan ekonomi klasik analisis di dasarkan pada kepercayaan dan efektivitas mekanisme pasar bebas. Teori ini dicetuskan oleh ahli ekonom klasik, yaitu Adam Smith dan David Ricardo. Sedangkan teori lain yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi adalah teori ekonomi modern. Teori pertumbuhan Harrod-Domar merupakan salah satu teori pertumbuhan ekonomi modern, pada teori ini menekankan arti pentingnya pembentukan investasi bagi pertumbuhan ekonomi. Jika semakin tinggi investasi maka akan semakin baik perekonomian. Selain teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar terdapat juga teori *Pro-Poor Growth* oleh Ravallion & Chen.

Menurut Kraay (2004) teori ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi efektif menurunkan kemiskinan apabila pendapatan masyarakat miskin tumbuh paling cepat atau setidaknya secara proporsional, bukan hanya rata-rata nasional. Mereka mengukur ini menggunakan *growth incidence curve* dan mendefinisikan pertumbuhan sebagai “*pro-poor*” bila indikator kemiskinan menurun.

2.1.4 Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan ekonomi merupakan masalah yang kompleks karena disebabkan oleh berbagai aspek dan menjadi salah satu perhatian bagi pemerintah. Ketimpangan pendapatan merupakan adanya perbedaan pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat sehingga berakibat tidak meratanya distribusi pendapatan nasional yang ada di antara masyarakat.

Menurut Sukirno dalam penelitian Najamuddin Arfah, (2021) mengemukakan bahwa pengukuran distribusi pendapatan dapat dilihat melalui dua konsep utama, yaitu ketimpangan absolut dan ketimpangan relatif. Ketimpangan absolut diukur berdasarkan nilai mutlak pendapatan, sedangkan ketimpangan relatif membandingkan proporsi pendapatan individu atau kelompok terhadap total pendapatan masyarakat. Ketimpangan ini umumnya disebabkan oleh perbedaan kepemilikan sumber daya dan faktor produksi, khususnya barang modal. Dalam kondisi ketimpangan yang ekstrem, ketika kekayaan terpusat pada satu individu, kemiskinan cenderung meningkat secara signifikan.

Ketimpangan mengacu pada standar hidup yang relatif pada seluruh masyarakat, karena kesenjangan antar wilayah adalah adanya perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia. Perbedaan ini yang menyebabkan tingkat pembangunan dan distribusi pendapatan di setiap wilayah berbeda-beda, sehingga menimbulkan adanya jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut.

Karakteristik suatu wilayah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pola pembangunan ekonomi yang terbentuk, sehingga menyebabkan perbedaan kemampuan pertumbuhan antar daerah. Perbedaan ini yang menyebabkan tingkat pembangunan dan distribusi pendapatan di setiap wilayah berbeda-beda, sehingga menimbulkan adanya gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut. Ketimpangan distribusi pendapatan antarwilayah umumnya diukur menggunakan koefisien gini, yang diperoleh melalui Kurva Lorenz. Kurva ini merepresentasikan distribusi kumulatif pendapatan dan dibandingkan dengan distribusi yang ideal (*uniform*). Menurut Todaro dan Smith dalam bukunya yang berjudul “*Economic*

Development” Kurva Lorenz digambarkan dalam sebuah bidang bujur sangkar, di mana sumbu horizontal menunjukkan persentase kumulatif penduduk dan sumbu vertikal menunjukkan persentase kumulatif pendapatan nasional.

Menurut Dumairy dalam penelitian Guner, (2020) menjelaskan distribusi pendapatan dalam kaitannya dengan pemerataan pembagian pendapatan, dapat dilihat dari segi:

1. Distribusi pendapatan antar lapisan pendapatan masyarakat.
2. Distribusi pendapatan antar wilayah, dalam hal ini antar provinsi dan antar kawasan (barat, tengah, timur).
3. Distribusi pendapatan antar daerah, dalam hal ini antar wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan.

2.1.4.1 Penyebab Ketimpangan Pendapatan

Aspek yang mempengaruhi ketimpangan dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Faktor tersebut yaitu karakteristik geografis, kondisi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan ekonomi suatu daerah. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah di Indonesia menyebabkan ketimpangan ekonomi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Sehingga perbedaan potensi sumber daya masing-masing daerah di Indonesia sangat berpengaruh terhadap ketimpangan ekonomi.

Hubungan antara kesenjangan dan kemiskinan sebagai hubungan yang pragmatis, yaitu bahwa kesenjangan menyebabkan kemiskinan semakin parah atau kesenjangan adalah bentuk dari kemiskinan (Sugiyarto et al., 2016).

Adelman dan Morris dalam Hariadi, (2007) mengemukakan delapan faktor yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara berkembang, yaitu:

1. Pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita.
2. Inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang.
3. Ketidakmerataan atau ketimpangan pembangunan antar daerah.
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal sehingga persentase pendapatan modal dari tambahan harta lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja. Menyebabkan pengangguran bertambah.
5. Rendahnya mobilitas sosial.
6. Pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.
7. Memburuknya nilai tukar bagi negara-negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidakelastisan permintaan negara-negara terhadap barang ekspor negara sedang berkembang.
8. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat, seperti pertukangan dan industri rumah tangga.

2.1.4.2 Teori Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan pendapatan yang dihasilkan masyarakat sehingga terjadi perbedaan pendapatan yang mencolok dalam masyarakat (Ratnasari, 2017). Perbedaan penghasilan yang tidak setara memiliki kecenderungan ketimpangan pendapatan yang lebih besar. Hal ini memiliki maksud bahwa beberapa golongan mempunyai penghasilan yang jauh lebih banyak dibanding lainnya (Manullang, 2024). Akibatnya yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin.

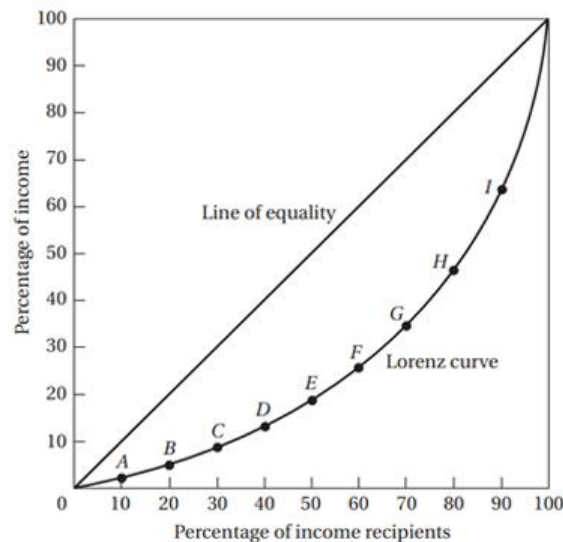
Ketimpangan pendapatan biasanya dilihat dengan dua indikator antara lain (Cendanawangi et al., 2020) :

1. Kurva Lorenz

Kurva Lorenz ialah salah satu indikator dalam melihat ketimpangan pendapatan yang dapat mengilustrasikan distribusi pada pendapatan nasional di beberapa lapisan masyarakat. Kurva ini terletak di dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya merepresentasikan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi datarnya merepresentasikan persentase kumulatif penduduk.

Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menandakan bahwa distribusi pendapatan nasional yang semakin merata, sebaliknya jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka menunjukkan

keadaan yang semakin buruk, dan distribusi pendapatan nasional semakin timpang dan tidak merata (Arsyad, 1997). Berikut gambar dari kurva lorenz :



Gambar 2. 1 Kurva Lorenz

2. Indeks Gini

Indeks Gini termasuk indikator ketimpangan dengan berfokus pada keterkaitan banyaknya penghasilan seseorang atau golongan tertentu dengan total pendapatan atau penghasilan sebagai pengukurannya. Tingkatan rata pada Indeks Gini bernilai antara 0 hingga 1. Nilai Indeks Gini yang mendekati 0 menjelaskan bahwa terdapat ketimpangan yang rendah begitupun sebaliknya apabila indeks gini mempunyai nilai dekat dengan 1 menjelaskan bahwa ketimpangan yang terjadi tergolong tinggi. Indeks gini digunakan untuk melihat adanya hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan.

2.1.5 Pengangguran

Menurut Sukirno (2012), pengangguran adalah di mana keadaan seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan, tetapi belum mendapatkan pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan.

Dalam hal lain pengangguran juga merupakan sekelompok orang atau seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan sama sekali, seseorang yang sedang mencari pekerjaan yang layak, dengan gaji yang lebih baik. “Pengangguran menggambarkan jumlah angkatan kerja yang tidak terserap dunia kerja atau tidak bekerja” (Demmy Salsabella et al., 2020).

Pengangguran menjadi masalah makro ekonomi yang membuat kebanyakan orang kehilangan pekerjaan untuk memenuhi standar kehidupan sehingga berdampak pada perekonomian suatu negara. Hal ini akan menimbulkan dampak-dampak negatif apabila tingkat pengangguran tinggi tidak berdampak terhadap sektor ekonomi tetapi juga sosial. Dampak dari pengangguran tersebut dapat berupa dampak ekonomi dan dampak sosial (Zia Urrahman P et al., 2022).

2.1.5.1 Tingkat Pengangguran

Menurut Hakim & Agustiani, (2024), tingkat pengangguran adalah persentase angkatan kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan. Jumlah penduduk dalam suatu negara dapat dibedakan menjadi penduduk usia kerja (15-64 tahun) dan bukan usia kerja yang termasuk kedalam kelompok usia non produktif yaitu usia 0-4 tahun dan manusia lanjut usia (manula) yang berusia lebih dari 65 tahun. Dari jumlah penduduk usia kerja yang masuk kedalam angkatan kerja adalah mereka yang mencari kerja atau bekerja.

Tingkat pengangguran merupakan persentase angkatan kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Dalam hal ini tingkat pengangguran dinyatakan sebagai persentase dari populasi aktif berbeda dengan jumlah pengangguran.

Perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja disebut tingkat pengangguran. Untuk mengukur tingkat pengangguran di suatu daerah, persentase dapat dibagi dengan jumlah pengangguran dengan jumlah penduduk aktif.

2.1.5.2 Teori Pengangguran

- 1) Teori Malthus, menyatakan bahwa semakin cepat populasi, semakin banyak tenaga kerja yang dihasilkan, tetapi ini tidak sesuai dengan kesempatan kerja yang ada. Karena rendahnya jumlah kesempatan, orang bersaing untuk pekerjaan dan mereka yang tersingkir dari persaingan akhirnya menganggur.
- 2) Teori *Human Capital* dapat diukur dengan melalui bidang pendidikan dan pelatihan serta dapat menjadi nilai tambah bagi seorang. Hal ini dapat dijelaskan dengan fakta bahwa semakin terdidik atau terlatih seseorang, semakin besar pula kemampuan dan keterampilannya. Ketika seseorang memiliki pendidikan yang lebih terdidik maka seseorang tersebut akan memiliki keterampilan, sehingga juga akan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Ini akan memudahkan seseorang untuk mencari pekerjaan, sehingga mengurangi tingkat pengangguran.
- 3) Menurut Adam Smith dan David Ricardo berpendapat bahwa peningkatan pengangguran di daerah dapat dikaitkan dengan peningkatan penduduk, karena

penduduk aktif sebagai pekerja, jadi ketika penduduk besar tanpa memiliki banyak pekerjaan, akan menyebabkan pengangguran.

2.1.5.3 Jenis Pengangguran

Menurut Case (2004), dalam bukunya *“Principles of Macroeconomics”*, pengangguran dapat dibedakan kedalam beberapa jenis yaitu sebagai berikut:

1. Pengangguran friksional, yaitu jenis pengangguran yang terjadi akibat transisi individu dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, baik karena alasan mencari pekerjaan yang lebih sesuai maupun karena perpindahan lokasi. Kondisi ini menciptakan jeda waktu sementara di mana individu tidak bekerja sebelum memperoleh pekerjaan baru.
2. Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur dalam perekonomian. Pencari kerja tidak mampu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk lowongan pekerjaan yang tersedia.
3. Pengangguran konjungtur, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh perubahan-perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Pada waktu kegiatan ekonomi mengalami kemunduran, perusahaan-perusahaan harus mengurangi aktifitas produksinya.

2.1.5.4 Bentuk Pengangguran

Menurut Sukirno (2012), jenis-jenis pengangguran berdasarkan cirinya sebagai berikut:

1. Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka merupakan penduduk yang telah memasuki pasar kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Hal ini terjadi

sebagai akibat pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan pekerjaan sehingga banyak tenaga kerja tidak memperoleh pekerjaan.

2. Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran tersembunyi merupakan suatu keadaan dimana jenis kegiatan ekonomi dilakukan oleh angkatan kerja yang melebihi dari yang diperlukan. Antara lain faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besar kecilnya perusahaan, kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan dan tingkat produksi yang dicapai, sehingga perusahaan mendorong untuk menaikkan produksinya. Lebih banyak pekerja baru akan mengurangi pengangguran, akan tetapi pada masa lainnya permintaan agregat akan menurun secara dramatis.

3. Pengangguran Musiman

Pengangguran yang terjadi pada waktu tertentu dalam satu tahun. Fenomena ini bisa terjadi pada sektor pertanian dimana petani akan menganggur saat menunggu masa tanam dan saat jeda antara musim tanam dan musim panen.

4. Setengah Menganggur

Setengah menganggur adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena ketiadaan lapangan kerja atau pekerjaan, atau pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), di Indonesia jam kerja normal adalah 35 jam seminggu.

5. Pengangguran Teknologi

Pengangguran ini disebabkan oleh adanya pergantian tenaga manusia oleh mesin dan bahan kimia seperti misalnya racun rumput, mesin, dan robot sehingga

mengurangi pengguna tenaga kerja manusia. Inilah yang dinamakan pengangguran teknologi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Kajian empiris adalah sebuah proses yang diperlukan dalam membangun kerangka pemikiran, hal ini bertujuan agar kerangka pemikiran memiliki dasar yang kuat. Mencari penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian merupakan salah satu proses dalam membangun kerangka berpikir. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2012-2021 (Herawati et al., 2023)	Variabel X: Inflasi, penganggura n, pertumbuhan ekonomi Variabel Y: Kemiskinan	Variabel X: Ketimpangan pendapatan,	Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan inflasi dan pengangguran baik secara parsial maupun secara simultan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2012-2021	Jurnal Ekonomi Integra Issn 0216 - 4337 Eissn 2581 - 0340 <i>Homepage:</i> Http://Journal. Stieip.Ac.Id/In dex.php/Iga
2	Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia	Variabel X: Inflasi Variabel Y: Kemiskinan	Variabel X: Tingkat Penganggura n, Ketimpangan	Inflasi, konsumsi, pendapatan perkapita, IPM memiliki hubungan negatif	Vol. 4, No. 2, Agustus 2014 Esensi

NO	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
	(Citra Pratama, 2014)		Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi	dengan tingkat kemiskinan, dan tingkat pendidikan memiliki hubungan positif dengan tingkat kemiskinan.	Jurnal Bisnis dan Manajemen
3	Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Surabaya (R. Amalia & Rachmawati, 2022)	Variabel X: Inflasi, penganggura n, pertumbuhan ekonomi Variabel Y: Kemiskinan	Variabel X: ketimpangan pendapatan,	Inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak ada pengaruh terhadap kemiskinan, sedangkan pengangguran memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan di Kota Surabaya.	Independent: <i>Journal Of Economics</i> E-Issn: 2798- 5008 Page 175-186 Volume 2 Nomor 1 2022
4	Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2009- 2016. (Ridzky Giovanni, 2018)	Variabel X: Penganggura n Variabel Y: Kemiskinan	Variabel X: Inflasi, ketimpangan, pendapatan, pertumbuhan ekonomi	Pengangguran dan pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY sedangkan PDRB berpengaruh terhadap kemiskinan di provinsi tersebut.	<i>Economics Development Analysis Journal 7 (1) (2018) Economics Development Analysis Journal</i> Http://Journal. Unnes.Ac.Id/S ju/Index.php/E daj
5	<i>The Effect of Inflation and Unemployment on Poverty in</i>	Variabel X: inflasi, tingkat	Ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi	Inflasi dan pengangguran memiliki dampak positif dampaknya	<i>Economic: Journal Economic And Business Vol.</i>

NO	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
	<i>Medan Unemployment on Poverty in Medan City</i> 2001 – 2022. (Siburian, 2023)	pengangguran Variabel Y: Kemiskinan		tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kota Medan.	2, No. 1, Januari 2023, Pp. 26~32
6	Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Pengangguran Dan Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Periode 2017-2021. (Sitti Rachma Ramadhani Maskur et al., 2023)	Variabel X: Ketimpangan Pendapatan, pengangguran Variabel Y: Kemiskinan	Variabel X: Inflasi, pertumbuhan ekonomi,	Ketimpangan pendapatan pengangguran, indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan provinsi di Indonesia.	Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP) Volume 8, Nomor 1. Tahun 2023 Page: 82-95 Http://Ojs.Uho.Ac.Id/Index.Php/JPEP E-ISSN: 2052-5171
7	Hukum OKUN: Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pengangguran Di Indonesia (Astari et al., 2019).	Variabel X : Pertumbuhan Ekonomi, tingkat pengangguran Variabel Y : Kemiskinan	Variabel X : Inflasi, ketimpangan pendapatan.	Hukum Okun terbukti berpengaruh negatif dan signifikan dalam perekonomian Indonesia karena variabel pertumbuhan ekonomi terbukti mempengaruhi variabel pengangguran secara statistik.	Jurnal Ekonomi Pembangunan, 8 (1) 2019, 37-44.
8	Pengaruh Gini Ratio, Pdrb Perkapita Dan	Variabel X : Inflasi Variabel Y :	Variabel X : Tingkat pengangguran	Gini Ratio, PDRB/Kapita dan Tingkat Inflasi	<i>Qe Journal</i> Vol.06 - No. 03 Desember

NO	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
	Tingkat Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara (Febriaty Nurwani, 2017)	Tingkat Kemiskinan	n, ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi	berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.	2017 – 174 <i>Qe Journal</i> Vol.06 - No. 03 Desember 2017 – 174
9	Analisis Kemiskinan Di Jawa Tengah & Rejekingsih, 2013)	Variabel X : Pengangguran, pertumbuhan ekonomi Variabel Y : Tingkat Kemiskinan	Variabel X : inflasi, ketimpangan pendapatan	Variabel kesehatan, pendidikan dan pengeluaran pemerintah signifikan dan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan variabel pengangguran signifikan dan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, artinya ketika jumlah pengangguran meningkat maka tingkat kemiskinan akan juga meningkat. namun untuk variabel pertumbuhan ekonomi tidak signifikan secara statistik mempengaruhi tingkat kemiskinan.	<i>Diponegoro Journal Of Economics</i> Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013,
10	<i>Analysis Of Economic Growth, Hdi, And Population</i>	Variabel X : Pertumbuhan ekonomi Variabel Y :	Variabel X : Inflasi, tingkat pengangguran	IPM dan tingkat populasi berpengaruh negatif dan signifikan	<i>Journal of Applied Economics in Developing</i>

NO	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
	<i>Impact On Poverty In Papua</i> (2012-2017) (Yosmaliza & Suryantoro, 2022)	Tingkat Kemiskinan	n, ketimpangan pendapatan	terhadap kemiskinan di Papua. Sementara itu, variabel tingkat pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Papua selama 2012-2017.	<i>Countries P-ISSN</i> 2354 – 6417 E-ISSN 2685 – 7448 Vol. 7 No. 2, September 2022, Page 92-101
11	<i>Determinants Of Poverty In Indonesia Through The Error Correction Model (ECM) Approach</i> (Rusneni et al., 2023)	Variabel X : Inflasi, tingkat pengangguran, Variabel Y : Tingkat Kemiskinan	Variabel X : Ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi	Pengangguran dan inflasi memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia selama periode 2002-2022. Variabel pengangguran memiliki efek yang signifikan terhadap kemiskinan dalam jangka panjang dan jangka pendek, sementara inflasi memiliki efek yang tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.	<i>International Journal of Life Science Research Archive</i> , 2023, 05(01), 069–075 <i>Article</i> DOI: https://doi.org/10.53771/ijlsra.2023.5.1.0078
12	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di	Variabel X : Pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, Variabel Y:	Variabel X : Inflasi, ketimpangan pendapatan	Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran positif terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan untuk variabel tingkat	Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi Volume 3. No. 2 (2020); April

NO	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
	Kota Makassar (Ishak et al., 2020).	Tingkat Kemiskinan		pendidikan berdasarkan rata- rata lama sekolah berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.	
13	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Sorong (Merlin Gifelem, 2023)	Variabel X : Pertumbuhan ekonomi, inflasi Variabel Y : Tingkat Kemiskinan	Variabel X : Ketimpangan pendapatan, tingkat penganggura n	variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan variabel inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Sorong tahun 2012- 2021.	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 23 Nomor. 6 Agustus 2023
14	<i>Inflation, Unemployment and Nairu Estimate in Indonesia: Phillips Curve Approach</i> (Hafnati & Syahnur, 2018)	Variabel X : inflasi, tingkat penganggura n Variabel Y : Kemiskinan	Variabel X : pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan	Bahwa dalam jangka panjang, pengangguran memberikan efek negatif dan signifikan terhadap inflasi, artinya semakin tinggi pengangguran, semakin rendah inflasi, konsisten dengan teori hubungan negatif <i>Phillips Curve</i>	Economic Analysis (2018, Vol. 51, No. 3-4, 24-32) DOI: 10.28934/ea.1 8.51.34.pp24- 32
15	Analisis Pengaruh Ketimpangan Pendapatan,	Variabel X : Ketimpangan pendapatan,	Variabel X : Inflasi, tingkat	Ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi memiliki	Buletin Ekonomika Pembangunan. https://journal.

NO	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
	Pertumbuhan Ekonomi, dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur Tahun 2023. (A. F. Amalia et al., 2024)	pertumbuhan ekonomi Variabel Y : Tingkat kemiskinan	penganggura n	hubungan negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, dan jumlah penduduk memiliki hubungan positif serta signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur.	trunojoyo.ac.id /bep Vol.5 No. 1 Februari 2024. E-ISSN : 2807-4998

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Hubungan Tingkat Inflasi terhadap Tingkat Pengangguran

Inflasi memiliki dampak langsung terhadap daya beli masyarakat dikarenakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu perekonomian. Hal ini menjadikan masyarakat yang ingin mencukupi kebutuhannya harus bekerja berbeda dengan masyarakat yang tidak bekerja sehingga mampu meningkatkan angka kemiskinan dalam suatu negara.

Dalam teori kurva Phillips yang diperkenalkan oleh A.W. Phillips pada tahun 1958, menggambarkan hubungan negatif antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Teori ini, menjelaskan ketika inflasi tinggi, pengangguran cenderung rendah, dan sebaliknya. Hal ini disebabkan oleh peningkatan permintaan agregat yang mendorong kenaikan harga dan penyerapan tenaga kerja.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hafnati & Syahnur, (2018) dan Karimah, (2023) menjelaskan bahwa dalam jangka panjang, pengangguran

memberikan efek negatif dan signifikan terhadap inflasi, artinya semakin tinggi pengangguran, semakin rendah inflasi, konsisten dengan teori hubungan negatif *Phillips Curve*. Sebaliknya dalam penelitian Handayani & Septian, (2022) menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran, yang berarti kenaikan inflasi cenderung meningkatkan tingkat pengangguran terbuka. Temuan ini bertentangan dengan teori Kurva Phillips yang menyatakan hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran. Hal ini didukung dari teori Milton Friedman dan Edmund Phelps, yang berpendapat bahwa Kurva Phillips tidak berlaku dalam jangka Panjang dikarenakan dalam jangka panjang, ekonomi cenderung akan kembali ke tingkat pengangguran alami. Hal ini terjadi karena tingkat pengangguran pada jangka panjang akan menyesuaikan tingkat inflasi. Dalam konteks ekonomi di Indonesia, hubungan ini tidak selalu konsisten. Hal ini tergantung pada periode dan kondisi ekonomi tertentu.

2.3.2 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran

Pertumbuhan ekonomi memiliki peran penting dalam menurunkan kemiskinan, namun dampaknya sangat tergantung pada sejauh mana pertumbuhan tersebut bersifat inklusif dan mampu menciptakan lapangan kerja sehingga mampu mengurangi angka pengangguran.

Menurut hukum Okun's Law yang dikemukakan oleh Arthur Okun menjelaskan bahwa antara pertumbuhan produk domestik bruto riil (GDP) dengan tingkat pengangguran memiliki hubungan negatif. Secara empiris, Okun menemukan bahwa pertumbuhan output riil sebesar 3 % dalam kondisi stabil

biasanya menghasilkan penurunan pengangguran sekitar 1 % (rasio 1:3) (Pasaribu, 2022).

Dalam studi penelitian yang dilakukan oleh Darman, (2019) dan Pasaribu, (2022) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi secara konsisten memiliki pengaruh negatif terhadap pengangguran selaras dengan Okun's Law. Sedangkan dalam penelitian Iswanto, (2013) menjelaskan bahwa meskipun hubungan teori antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran tercatat negatif, koefisien okun tidak signifikan secara statistik, namun variabel pertumbuhan GDP tetap memengaruhi penurunan pengangguran secara statistik.

2.3.3 Hubungan Ketimpangan Pendapatan terhadap Tingkat Pengangguran

Ketimpangan pendapatan memiliki hubungan terhadap tingkat pengangguran karena distribusi pendapatan yang tidak merata menandakan adanya kelompok masyarakat yang bekerja dan tidak bekerja sehingga menyebabkan adanya kesenjangan dalam pendapatan yang diterima. Hal ini didukung dengan Teori Galor–Zeira (1988, 1993) yang menyatakan bahwa imperfeksi pasar modal dan indivisibilitas investasi dalam modal manusia menjadikan distribusi pendapatan (ketimpangan) berpengaruh terhadap aktivitas makroekonomi. Ketimpangan yang tinggi dapat membatasi akses pendidikan bagi sebagian populasi, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi dan berdampak pada struktur pengangguran di masa depan.

Selain itu, Hipotesis Kuznets mengusulkan hubungan terbalik berbentuk *Inverted-U* antara ketimpangan dan kemajuan ekonomi: di tahap awal pertumbuhan, ketimpangan meningkat, lalu menurun di tahap lanjutan. Meskipun

fokus utamanya bukan pengangguran, fenomena ini berkaitan erat dengan distribusi pekerjaan yang memengaruhi tingkat pengangguran secara tidak langsung.

Dalam studi yang dilakukan oleh Muryani, (2023) ditemukan bahwa pengangguran berhubungan negatif dengan ketimpangan pendapatan. Artinya, tidak sekadar jumlah pekerjaan, melainkan pekerjaan berkualitas, yang mampu memperkecil kesenjangan pendapatan. Studi ini juga mendukung hipotesis kuznets jangka pendek, yang dimana pertumbuhan dengan pendapatan awal mampu meningkatkan ketimpangan, tetapi hal itu mampu menurun seiring waktu dan kemajuan human capital. Sedangkan dalam penelitian (Meiran Panggabean, 2023) menunjukkan hubungan positif antara pengangguran dan ketimpangan pendapatan, serta hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan. Ini menunjukkan bahwa semakin bertambah pengangguran, semakin melebar kesenjangan pendapatan antar wilayah.

2.3.4 Hubungan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan

Tingkat pengangguran memiliki pengaruh yang erat terhadap tingkat kemiskinan karena pengangguran berarti seseorang tidak memperoleh penghasilan tetap, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan. Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa peningkatan tingkat pengangguran mendorong bertambahnya jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Sumatera Utara oleh Marito, (2023) menunjukkan bahwa pengangguran terbuka, rendahnya modal manusia, dan jumlah penduduk secara signifikan berkontribusi terhadap kemiskinan. Studi oleh Amin, (2024) juga memperkuat bahwa pengangguran memiliki dampak langsung

yang positif terhadap kemiskinan, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak selalu menjadi faktor penentu yang signifikan. Di Kalimantan Tengah, Parulian & Hukom, (2023) menekankan bahwa rendahnya keterampilan kerja memperburuk pengangguran dan kondisi ekonomi masyarakat berpendapatan rendah, sehingga langsung meningkatkan tingkat kemiskinan.

Hal ini diperkuat menurut teori klasik Adam Smith dan David Ricardo, menjelaskan bahwa peningkatan jumlah penduduk tanpa diiringi pertumbuhan lapangan kerja akan menyebabkan pengangguran karena tenaga kerja tidak terserap. Adam Smith menekankan pentingnya produktivitas dan pembagian kerja, sementara Ricardo menyatakan bahwa kelebihan tenaga kerja akan menekan upah ke tingkat subsisten. Kondisi ini membuat masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, sehingga mendorong mereka ke dalam kemiskinan. Teori ini memperkuat temuan empiris bahwa pengangguran berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kemiskinan, terutama di daerah dengan jumlah penduduk besar dan lapangan kerja terbatas.

2.3.5 Hubungan Tingkat Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan

Tingkat inflasi di Indonesia memiliki dampak terhadap kemiskinan. Adanya kenaikan harga barang dan jasa dapat menurunkan daya beli rumah tangga berpendapatan rendah sehingga pendapatan riil mereka tidak lagi mampu memenuhi standar kebutuhan minimum. Kondisi ini sejalan dengan *real income effect* yang menjelaskan bahwa kelompok miskin sangat rentan terhadap perubahan harga pangan karena proporsi pengeluaran konsumsi dasarnya sangat besar. Kenaikan inflasi yang tinggi dapat menekan pertumbuhan ekonomi dan

menurunkan lapangan kerja di sektor informal yang banyak ditempati kelompok miskin, hal ini mendorong bertambahnya angka kemiskinan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yolanda, (2017) menjelaskan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan tingkat kemiskinan. Peningkatan inflasi menyebabkan harga kebutuhan pokok dalam konsumsi rumah tangga miskin menjadi lebih mahal, sehingga pendapatan riil mereka menurun. Ketika pendapatan riil menurun, kemampuan masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar juga menurun, sehingga jumlah penduduk miskin meningkat. Hal ini didukung dengan teori ekonomi Keynesian yang menjelaskan bahwa inflasi berdampak pada kemiskinan terutama melalui penurunan pendapatan riil dan melemahnya daya beli masyarakat berpendapatan rendah. Ketika harga naik lebih cepat daripada pendapatan nominal, menjadikan masyarakat berpendapatan rendah sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar sehingga kemiskinan meningkat.

Keynes juga menekankan bahwa inflasi tipe *cost-push*, seperti kenaikan harga pangan atau energi, dapat menekan output dan meningkatkan pengangguran, yang pada akhirnya memperburuk kondisi kemiskinan. Dalam hal ini, inflasi yang tinggi dan tidak terkendali menjadi faktor yang mendorong peningkatan kemiskinan melalui mekanisme pendapatan riil dan pasar tenaga kerja.

2.3.6 Hubungan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan

Laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Ketika ekonomi tumbuh dengan cepat artinya pendapatan nasional dan pendapatan per kapita meningkat. Hal ini mampu menciptakan lapangan kerja lebih banyak, meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin, sehingga menurunkan

tingkat kemiskinan. Sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi lambat atau tidak inklusif, maka dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan akan terbatas.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Suryadarma, (2006) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, di mana peningkatan PDB per kapita mampu menurunkan persentase penduduk miskin melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kustanto, 2021) yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berperan dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan menurunkan kemiskinan ketika diiringi peningkatan kualitas pembangunan manusia. Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan teori *trickle-down* yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi akan mengalirkan manfaat ke kelompok berpendapatan rendah melalui ekspansi tenaga kerja dan kenaikan pendapatan. Laju pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi mampu menurunkan kemiskinan, dengan syarat pertumbuhan tersebut bersifat inklusif dan merata. Dalam hal ini laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Indonesia harus diiringi dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

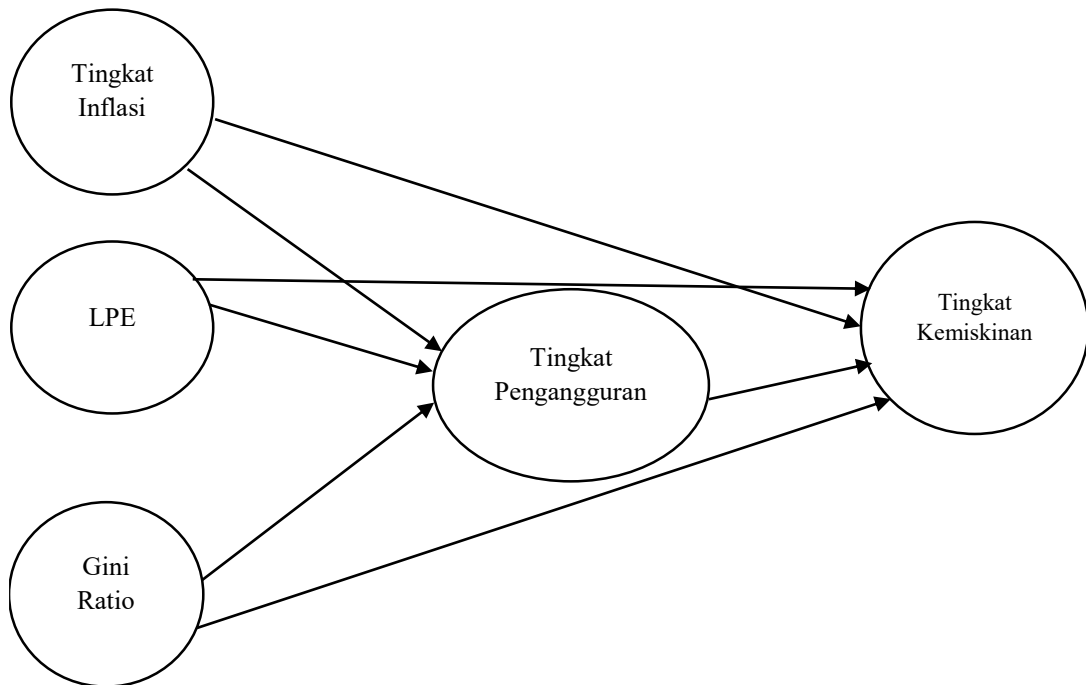
2.3.7 Hubungan Ketimpangan Pendapatan terhadap Tingkat Kemiskinan

Ketimpangan pendapatan akibat distribusi pendapatan antar individu atau rumah tangga yang berbed. Terdapat kelompok yang mendapatkan pendapatan tinggi dan kelompok lain yang sangat rendah. Di Indonesia, semakin besar ketimpangan pendapatan, semakin besar pula proporsi rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan atau sulit keluar dari kemiskinan. Hal ini karena ketika pendapatan terkonsentrasi di kelompok atas, maka kelompok bawah memiliki

sedikit akses terhadap sumber ekonomi, kesempatan kerja, modal, atau pendidikan, sehingga daya guna pendapatan mereka rendah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Eva Safrinja, (2024) menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh, di mana kenaikan nilai gini ratio mempersempit akses kelompok berpendapatan rendah terhadap sumber daya ekonomi sehingga meningkatkan kerentanan kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh (Sugiyarto et al., 2015) juga menjelaskan bahwa tingginya ketimpangan pendapatan rumah tangga menyebabkan sebagian besar penduduk pedesaan berada pada kondisi kemiskinan. Hal ini didukung dengan teori *relative deprivation*, yang menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan membatasi mobilitas ekonomi kelompok miskin melalui hambatan akses pendidikan, modal, dan pasar tenaga kerja. Selain itu, teori *growth-elasticity of poverty reduction* menegaskan bahwa tingginya ketimpangan akan mengurangi efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan kemiskinan, dikarenakan manfaat pertumbuhan terdistribusi tidak merata dan hanya dinikmati oleh kelompok berpendapatan tinggi. Hal ini menegaskan bahwa ketimpangan pendapatan yang tidak merata mampu memperburuk tingkat kemiskinan di Indonesia.

Secara sistematis kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang didasarkan pada kerangka teori yang relevan, namun belum didukung oleh bukti-bukti empiris yang diperoleh melalui penelitian lapangan (Dr. Sugiono, 2019). Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka penulis merumuskan beberapa hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga tingkat inflasi dan ketimpangan pendapatan berpengaruh positif, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran di Indonesia tahun 2005-2023.
2. Diduga laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif, sedangkan tingkat inflasi dan ketimpangan pendapatan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2005-2023.

3. Diduga tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2005-2023.
4. Diduga tingkat inflasi, ketimpangan pendapatan berpengaruh positif sedangkan laju pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia melalui tingkat pengangguran tahun 2005-2023.